

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abdul Mahsyar, dan Anwar Parawangi. (2023). "Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar," *Jurnal Kolaborasi*, Vol. 7 No. 1.
- Ambarwati, S., Danang, A., & Nurhalimah, N. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, Vol. 16 No. 2.
- Arif Purbantara dan Mujianto, *Modul Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 2019.
- Ateng Syafrudin. (2003). *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Bandung: Tarsito.
- Azwat, N. (2020). Sinergitas pendamping desa dan pemerintah desa dalam pembangunan desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Nuryani. Skripsi, 2017(1).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Desa Tahun 2023, hlm. 5, tersedia daring di <https://bpk.go.id>.

BPS Kabupaten Tulungagung.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung. (2022). Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 <https://pemerintahan.tulungagung.go.id/wp-content/uploads/2025/03/Buku-Rlppd-Tahun-2022-Fix-Ttd.pdf>, diakses tanggal 20 Agustus 2025.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung. Profil Kemiskinan Maret 2024, 23 Agustus 2024, tersedia daring di <https://tulungagungkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/23/73/profil-kemiskinan-maret-2024.html>.

Cook, Sarah, dan Steve Macaulay. (1996). *Perfect Empowerment: The Theory of ACTORS in Community Development*.

Edi Suharto. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Esterberg, Kristin G., “*Qualitative Methods in Social Research*” New York: McGraw-Hill, 2002.

Indonesia Corruption Watch. (2020). Hasil Pemantauan Bansos: 239 Temuan dan Aduan Warga, Tertinggi Terkait Pemotongan dan Pungutan Liar.

Implementasi Kebijakan Publik, (Medan: Universitas Medan Area, 2025).

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Komite Nasional Kebijakan Good Governance Indonesia. (2025). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 10 No. 1.

Kurangnya Akuntabilitas: Penyebab dan Dampaknya pada Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Publik, 2024, tersedia daring di <https://seputarbirokrasi.com/kurangnya-akuntabilitas-penyebab-dan-dampaknya-pada-penyalahgunaan-wewenang-pejabat-publik/>, diakses tanggal 5 September 2025.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif, 'Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).

Luqman Al-Hakim. (2023). "Dimensi Spiritualitas dalam Kitab Al-Fūyūḍāt Al-Rabbāniyyah bi Tafsīr Ba'Di Al-Āyāt Al-Qur'āniyyah," *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 10 No. 1.

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. University of California, Berkeley.

Muhammad Rosyidi dan Mahmuji. (2024). "Penerapan Fiqih Siyash Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1.

Ombudsman Republik Indonesia. Problem Solving Bantuan Sosial dan DTKS, 26 Juni 2024, tersedia daring di <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--problematika-bantuan-sosial-dan-dtks>, diakses 19 Agustus 2025.

Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tulungagung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung. (2022). Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tulungagung.

Profil Kelurahan Kutoanyar, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 2021, tersedia daring di <http://kutoanyar.tulungagung.go.id/profil-umum/>.

Proyek Wisata Mangkrak, Penyidik Polres Tulungagung Lakukan Penggalian Fakta diakses

dari <https://finews.co.id/peristiwa/2025/proyek-wisata-mangkrap-penyidik-polres-tulungagung-lakukan-penggalian-fakta/>.

Rabiatul Saufiah, Arpandi, Saidah Hasbiyah. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 1, no. 5.

Setiadi, Hadi. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Soekanto, S. (2004). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soeharto, Edi. (2006). Pemberdayaan Masyarakat: Upaya Memperkuat Kemampuan dan Potensi. Dalam *Jurnal Inovasi*, Vol. 7 No. 4, Desember 2010.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Suparman. (2022). Konsep Syura Dalam Politik Islam Menurut Al-Qur'an, *Jurnal Ilmu Islam dan Politik*, Vol. 10 No. 2.

Surmayadi, N. I. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.

Sukanto Reksohadiprodjo. (1992). *Dasar-Dasar Manajemen (Edisi 5)*. Yogyakarta: BPFE.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Widjaja, H. (2002). *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.